



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

KAB. SIKKA



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka ini dapat tersusun.

Laporan ini menyajikan gambaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka yang memuat program/kegiatan, target dan realisasi serta berbagai permasalahan yang dihadapi dan solusi yang telah dibuat.

Tujuan penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan informasi tentang Pelaksanaan dan capaian Program/Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan pengendalian.

Demikian laporan Kegiatan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ini dibuat, semoga laporan ini akan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka serta bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Maumere, 13 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sikka,



PAULUS HILARIUS BANGKUR, S.Pi, M. Pi

Pembina Utama Muda

NIP. 19660628 199703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Gambaran Umum Badan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	1
1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	1
Bab II Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Realisasi	8
I. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta capaian tahun 2024 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	17
II. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	20
III. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta capaian tahun 2024 pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	22
IV. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	23

V.	Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta capaian tahun 2024 pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	29
VI.	Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	30
VII.	Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta capaian tahun 2024 pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IW) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	32
VIII.	Gambaran Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IW) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	33
IX.	Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta capaian tahun 2024 pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	35
X.	Gambaran Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	36
XI.	Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta capaian tahun 2024 pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	44

XII.	Gambaran Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	45
XIII.	Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta capaian tahun 2024 pada UPT. Sikka Inovation Center (SIC) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	46
XIV.	Gambaran Pelaksanaan Kegiatan pada UPT. Sikka Inovation Center (SIC) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	46
Bab III	Penutup	56
3.1.	Kesimpulan	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sikka 9
Tabel 2.2	Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPTD. Pengolahan Produk Daerah Tahun 2024 47
Tabel 2.3	Rekapan Penjualan Cokelat Sikka berdasarkan Varian Bulan januari s/d Desember 2024 47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka	7
Gambar 2. 1 Foto-foto Pelaksanaan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sikka Tahun 2024	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

1.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan dan bidang Riset dan Inovasi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Riset dan Inovasi membawahi :
 - i. kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - ii. kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di Daerah.
- h. Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre, terdiri dari :
 1. Kepala UPT; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
4. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. pengkajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
11. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;

7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan dan Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman, dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
12. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
13. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; dan
14. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
15. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Riset dan Inovasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis Riset dan Inovasi pemerintahan Kabupaten;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran riset dan inovasi pemerintahan Kabupaten;
3. pelaksanaan riset dan inovasi di pemerintahan Kabupaten;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

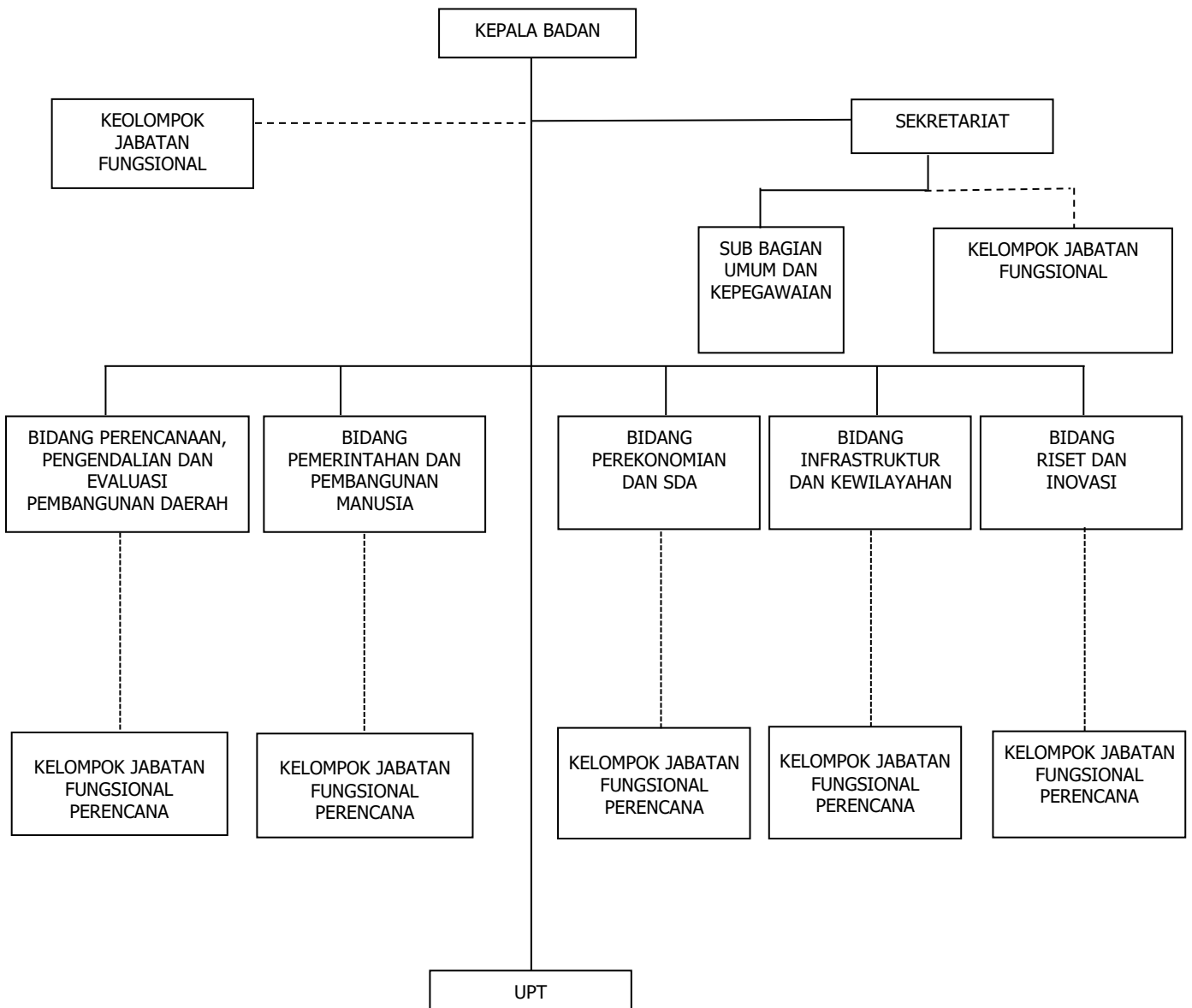
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi lingkup pemerintahan Kabupaten;
8. pelaksanaan administrasi riset dan inovasi daerah Kabupaten; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka. UPT Sikka Inovation Centre dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka yang terdiri atas manajemen kekayaan intelektual, inkubasi dan alih teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Sikka Inovation Centre mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebutuhan Anggaran dan Perlengkapan guna disampaikan kepada Kepala Badan;
2. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada Kepala Badan;
3. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan percepatan keberhasilan pengembangan bisnis bagi masyarakat;
4. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual yang meliputi perencanaan pengembangan dan perlindungan produk;
5. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka sesuai dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sikka



BAB II

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA REALISASI

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka menyampaikan Laporan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Tahun 2024. Laporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengendalian dan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka mendorong dan melakukan perbaikan-perbaikan guna peningkatan capaian kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

Bapperida Kabupaten Sikka melaksanakan 2 Bidang Urusan yaitu Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan. Pelaksanaan Kedua Bidang urusan ini di dukung dengan 4 program, 15 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Alokasi anggaran Bapperida Kabupaten Sikka tahun 2024 adalah sebesar Rp.12.157.528.186,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.090.080.813,- atau sebesar 91.22% yang tersebar pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dilaksanakan dengan 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.752.507.608,- terealisasi sebesar Rp4.378.914.248,- atau 92.14%.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan 4 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana sebesar Rp2.279.669.130,- terealisasi sebesar Rp2.030.025.640,- atau 89.05%.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan 3 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana sebesar Rp1.347.977.680,- terealisasi sebesar Rp1.023.107.283,- atau 75.90%.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilaksanakan dengan 4 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana sebesar Rp3.777.373.768,- terealisasi sebesar Rp3.658.033.642,- atau 96.84%.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Bapperida Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNA JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1. Indeks Kualitas Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%					383,774,700	524,980,180	547,326,996	823,587,254	57,378,700	680,005,140	300,148,000	992,493,800	Hilarius Rangga Mesa, S.Si
	2. Persentase Ketersediaan Data sesuai Permendagri 86/2017	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%					208,362,200	288,055,400	189,336,890	466,441,000	15,077,700	431,182,300	52,312,500	589,664,900	Paskalia Carmelita Monasare, SE
	3. Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dan Kesesuaian antar Bab : 70%	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				9,586,250	30,350,000	112,830	100,000	9,341,600	200,000	30,350,000	40,000	Saverinus Keupung, SE
	4. Persentase Kegiatan Perencanaan yang sesuai dengan Tahapan dan Waktu (Evaluasi kebijakan)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara				25,129,880	151,251,600	10,831,060	-	2,325,000	162,780,200	11,548,000	5,439,900	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	586 usulan	586 usulan				94,766,070	-	660,000	-	-	93,576,100	1,096,400	-	
	5. Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	78,880,000	106,453,800	177,733,000	466,341,000	3,411,100	174,626,000	9,318,100	584,185,000		
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	4 Dok				875,000	35,746,860	33,023,260	29,357,640	1,750,000	399,920	34,471,400	42,800,900	Alfred Zedekias, SE	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-	13,816,860	3,635,220	-	875,000	399,920	12,541,400.00	1,925,000		
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku		1 Buku		875,000	21,930,000	29,388,040	29,357,640	875,000	-	21,930,000.00	40,875,900		
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Laporan				113,427,500	109,167,920	226,516,846	253,178,614	40,551,000	132,422,920	156,826,500	230,494,800	Paskalia Carmelita Monasare, SE	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	-	9,817,920	121,070,180	100,075,580	-	9,817,920	53,643,000.00	82,906,000		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	113,427,500	99,350,000	105,446,666	153,103,034	40,551,000	122,605,000	103,183,500.00	147,588,800		
		Kegiatan Impelementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangnan Daerah	Jumlah Impelementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangnan Daerah	100%				61,110,000	92,010,000	98,450,000	74,610,000	-	116,000,000	56,537,600	129,533,200	Saverinus Keupung, SE	
		Penetapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	61,110,000	92,010,000	98,450,000	74,610,000	-	116,000,000	56,537,600.00	129,533,200		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNA GIJAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%					157,299,790	398,867,776	370,225,322	421,584,792	63,183,200	175,246,850	240,024,966	544,652,267	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%					62,212,500	190,348,476	188,932,516	173,146,478	20,787,000	55,801,420	154,151,406	223,746,410	Drs. Hironimus Laja
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	3 Dok	4 Dok	4 Dok		16,535,000	29,112,626	24,670,254	21,114,300	10,197,000	19,524,000	24,992,626.00	24,886,130	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	3 Lap		3 Lap		-	4,026,000	5,824,240	9,055,560	-	4,026,000	-	8,385,400	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	3 Lap	4 Lap	3 Lap	3 Lap	-	9,400,000	7,306,370	2,400,000	3,400,000	-	-	10,318,400	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	6 Laporan	3 Lap		3 Lap		-	-	16,386,200	18,040,000	-	-	-	590,100	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17 Dokumen	6 Dok	2 Dok	8 Dok	1 Dok	45,677,500	147,809,850	90,599,595	111,782,985	7,190,000	32,251,420	124,250,780.00	166,688,780	1. Charolus Luanga Saka, S.IP, M.Tr.IP 2. Maria Mei Ika Yuplina, S.STP, M.Ec. Dev
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	6 Lap		6 Lap		-	-	31,528,757	2,824,133	-	-	4,908,000.00	6,866,800	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26 Laporan	6 Lap		6 Lap		-	-	12,617,100	7,929,500	-	-	-	6,010,800	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNA GIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%					62,895,690	115,228,400	54,880,780	147,531,220	23,663,600	63,429,090	47,744,000	153,160,397	Yeremias Dewa,S.Pt,MP
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19 Dokumen	7 Dok	2 Dok	10 Dok		10,541,600	10,270,000	6,449,640	14,584,340	15,571,600	3,654,000	4,974,000.00	14,694,400	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Laporan	7 Lap		7 Lap		16,600,000	19,904,660	14,614,000	40,561,200	-	10,887,660	14,872,000.00	18,082,497	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29 Laporan	7 Lap	7 Lap	8 Lap	7 Lap	17,500,000	18,994,400	8,630,000	13,717,840	3,400,000	20,220,000	6,560,000.00	27,509,400	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	14 Laporan		7 Lap		7 Lap	8,754,090	11,395,580	4,916,200	6,928,860	-	2,249,670	21,338,000.00	1,613,800	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	2 Dok	2 Dok	4 Dok		2,250,000	14,391,060	5,500,940	18,181,460	2,442,000	14,073,060	-	15,918,700	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	2 Lap	2 Lap			2,250,000	4,500,000	2,950,000	17,941,710	2,250,000	4,464,000	-	14,406,200	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9 Laporan	2 Lap	2 Lap	3 Lap	2 Lap	-	21,480,000	5,000,000	31,332,690	-	-	-	40,117,800	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	2 Lap		2 Lap		5,000,000	14,292,700	6,820,000	4,283,120	-	7,880,700	-	20,817,600	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNA JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%					32,191,600	93,290,900	126,412,026	100,907,094	18,732,600	56,016,340	38,129,560	167,745,460	Theresia Maria Da Renya Sabeweo, ST, MT
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13 Dokumen	5 Dok	2 Dok	6 Dok		16,245,600	19,924,000	22,209,730	28,035,400	7,558,600	19,704,000	6,948,000.00	39,132,800	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 Laporan	5 Lap		5 Lap		660,000	2,640,000	14,878,780	9,339,380	660,000	2,640,000	-	8,557,980	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	4,760,000	7,140,000	19,205,520	15,292,300	-	4,760,000	7,140,000.00	32,398,400	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	5 Lap		5 Lap		-	10,431,020	12,589,760	12,895,780	-	10,431,020	-	21,122,880	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42 Dokumen	21 Dok		21 Dok		7,806,000	5,163,000	20,947,681	9,529,709	7,794,000	5,173,000	-	11,764,800	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42 Laporan	21 Lap		21 Lap		-	6,648,600	6,415,460	6,468,000	-	-	-	16,593,700	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	84 Laporan	21 Lap	21 Lap	21 Lap	21 Lap	2,720,000	15,440,000	17,596,845	9,139,455	2,720,000	2,720,000	12,720,000.00	16,620,900	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	42 Laporan	21 Lap		21 Lap		-	25,904,280	12,568,250	10,207,070	-	10,588,320	11,321,560.00	21,554,000	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNA GIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%					256,534,538	1,040,950,721	463,569,198	2,016,319,311	31,804,532	205,975,448	532,800,340	2,887,453,322	Fransiskus S. Narabata, ST,M.Sc
	Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan yang direkomendasikan	100%					61,001,806	234,545,090	255,351,050	385,018,154	25,514,532	66,134,103	129,453,080	683,887,214	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan				2 Lap	21,779,700	112,268,000	190,087,860	149,560,240	2,818,000	1,237,700	89,412,000.00	376,268,714	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan				2 Lap	11,395,270	44,108,690	22,285,290	50,110,050	-	22,706,280	21,517,680.00	82,388,100	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan yang dikelola dengan baik	1 Laporan				1 Lap	24,168,836	14,820,000	34,611,900	111,542,764	950,000	25,018,836	-	144,125,500	
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan				2 Lap	3,658,000	63,348,400	8,366,000	73,805,100	21,746,532	17,171,287	18,523,400.00	81,104,900	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%					75,000,000	182,980,000	1,854,300	422,481,800	-	4,980,000	-	662,661,960	
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2 Dokumen				2 Dok	75,000,000	182,980,000	1,854,300	422,481,800	-	4,980,000	-	662,661,960	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%					3,810,000	400,081,805	74,857,928	348,164,867	-	59,719,185	206,476,620	534,597,828	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen				3 Dok	3,810,000	400,081,805	74,857,928	348,164,867	-	59,719,185	206,476,620.00	534,597,828	
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0 Dokumen					-	-	-	-	-	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNA GIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100%					116,722,732	223,343,826	131,505,920	860,654,490	6,290,000	75,142,160	196,870,640	1,006,306,320	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen				5 Dok	108,289,572	197,093,126	85,699,380	753,917,190	3,570,000	60,979,500	192,620,640.00	863,789,030	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan				1 Lap	7,929,160	22,608,700	44,724,540	74,737,500	2,720,000	10,017,860	4,250,000.00	130,283,830	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan				1 Lap	504,000	3,642,000	82,000	-	-	4,144,800	-	-	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan				1 Lap	-	-	1,000,000	31,999,800	-	-	-	12,233,460	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur	Indeks kualitas sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%					1,138,495,962	1,349,579,951	1,145,251,944	1,119,179,751	535,373,321	1,821,062,698	765,535,772	1,256,942,457	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok					7,395,710	5,240,000	6,256,000	15,145,670	2,335,000	4,391,710	4,520,000	18,687,360	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1,613,850	540,000	-	4,846,150	935,000	784,250	-	5,263,480	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	4 Lap				5,131,860	4,250,000	5,406,000	5,249,520	1,400,000	3,087,460	4,520,000.00	6,977,080	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	650,000	450,000	850,000	5,050,000	-	520,000	-	6,446,800	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNA GIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%					923,024,563	1,020,400,762	870,948,347	670,590,101	427,438,827	1,541,673,893	503,317,056	731,724,640	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Org	38 Org	38 Org	38 Org	38 Org	898,288,983	995,629,262	847,955,907	640,916,791	420,469,827	1,509,961,813	485,113,056.00	688,428,640	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260 Dok	59 Dok	74 Dok	91 Dok	59 Dok	24,735,580	24,771,500	22,992,440	29,673,310	6,969,000	31,712,080	18,204,000.00	43,296,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	100%					1,550,000	2,742,000	1,150,000	2,091,980	270,000	3,648,700	-	3,613,200	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	130 Dok	33 Dok	43 Dok	40 Dok	14 Dok	1,550,000	2,742,000	1,150,000	2,091,980	270,000	3,648,700	-	3,613,200	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%					33,101,567	80,510,851	68,099,297	118,914,475	14,902,800	50,685,510	78,417,180	146,554,841	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	2 Paket			1 Paket	1 Paket	40,000	2,992,000	-	6,965,260	40,000	500,000	2,492,000.00	6,512,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	12,389,517	12,389,511	12,412,771	12,808,191	997,000	17,792,290	11,531,600.00	19,334,400	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	-	-	-	6,986,830	-	-	-	6,813,950	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket			7 Paket	8 Paket	-	5,113,090	11,044,910	24,569,110	-	-	8,688,000.00	28,640,300	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5,655,800	25,000,000	-	19,344,200	5,655,800	-	25,000,000.00	19,344,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	15 Laporan	15,016,250	35,016,250	44,641,616	48,240,884	8,210,000	32,393,220	30,705,580.00	65,910,191	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daaerah	100%					-	26,601,500	-	49,062,600	-	251,500	26,350,000	45,302,920	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	13 Unit		3 Unit	1 Unit	9 Unit	-	26,601,500	-	49,062,600	-	251,500	26,350,000.00	45,302,920	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNA GIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%					163,372,874	190,385,080	155,314,292	159,119,714	88,291,546	198,265,977	143,041,086	190,435,227	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	45,883,903	72,117,076	45,338,261	52,043,450	18,097,706	60,858,297	31,203,416.00	59,663,147	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	117,488,971	118,268,004	109,976,031	107,076,264	70,193,840	137,407,680	111,837,670.00	130,772,080	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%					10,051,248	23,699,758	43,484,008	104,255,211	2,135,148	22,145,408	9,890,450	120,624,269	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	3 unit		10 unit		6,901,148	16,519,758	30,278,773	43,470,961	2,135,148	18,365,308	2,920,450.00	68,302,864	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit			1 unit		-	-	1,582,175	1,753,790	-	-	-	3,335,965	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 unit				750,100	30,000	4,001,510	4,217,830	-	780,100	-	867,500	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit					-	-	4,996,550	4,996,550	-	-	-	49,500	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7 Unit			7 unit		-	3,550,000	-	46,441,080	-	50,000	3,500,000.00	46,438,440	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20 Unit	3 Unit	13 Unit	6 Unit		2,400,000	3,600,000	2,625,000	3,375,000	-	2,950,000	3,470,000.00	1,630,000	

Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sikka pada Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

I. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Capaian Tahun 2024.

Melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.752.507.608,- terealisasi sebesar Rp4.378.914.248,- atau 92.14%, untuk membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp34.037.380,- terealisasi sebesar Rp29.934.070,- atau 87,94%, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Renja, DPA, DPPA, LKPJ, LAKIP, LPPD, Perjanjian Kinerja dan Dokumen SAKIP Bapperida Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp3.484.963.773,- terealisasi sebesar Rp3.204.154.416,- atau 91,94%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.382.790.943,- terealisasi sebesar Rp3.103.973.336,- atau 91,76%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan ASN, Pemberian Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan Insentif atas pemungutan retibusi jasa usaha penjurulanan Cho-sik.
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.172.830,- terealisasi sebesar Rp100.181.080,- atau 98,05%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Administrasi Pengajuan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Bapperida Kabupaten Sikka selama Tahun 2024.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.533.980,- terealisasi sebesar Rp7.531.900,- atau 99,97%. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.533.980,- terealisasi sebesar Rp7.531.900,- atau 99,97%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai penyediaan komponen dan peralatan listrik.

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.626.190,- terealisasi sebesar Rp290.560.331,- atau 96,65%. Kegiatan ini meliputi 6 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.997.260,- terealisasi sebesar Rp9.544.000,- atau 95,47%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai penyediaan komponen dan peralatan listrik.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.999.990,- terealisasi sebesar Rp49.655.290,- atau 99,31%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.986.830,- terealisasi sebesar Rp6.813.950,- atau 97,53%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kebutuhan alat penghias ruang kerja (Gorden).
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.727.110,- terealisasi sebesar Rp37.328.300,- atau 91,65%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai makan minum rapat, penyelesaian teknis kegiatan dan penyediaan makan minum tamu.
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,- terealisasi sebesar Rp49.999.800,- atau 100%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kebutuhan penggandaan, cetak dan penjilidan bahan keperluan kantor.
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.915.000,- terealisasi sebesar Rp137.218.991,- atau 96,01%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan koordinasi kedalam dan keluar daerah.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp75.664.100,- terealisasi sebesar Rp71.904.420,- atau 95,03%, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Pengadaan laptop, Pengadaan Printer, Pengadaan Infocus, AC, Tiang mic dan drone untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bapperida Kabupaten Sikka.
- 6) Kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp668.191.960,- terealisasi sebesar Rp620.033.836,- atau 92,79%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp215.382.690,- terealisasi sebesar

- Rp169.822.566,- atau 78.85%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai layanan jasa air, listrik, telepon, internet, dan Hosting website pada Bapperida Kabupaten Sikka dan UPT Sikka Inovation Centre (SIC).
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp452.809.270,- terealisasi sebesar Rp450.211.270,- atau 99,43%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai honorarium pegawai honorer/tidak tetap pada Kantor Bapperida sebanyak 6 orang, pada UPT. SIC sebanyak 7 orang upah kerja sopir sebanyak 1 orang serta untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp181.490.225,- terealisasi sebesar Rp154.795.275,- atau 85,29%. Kegiatan ini meliputi 6 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.170.640,- terealisasi sebesar Rp91.723.770,- atau 94,39%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai jasa service, pengadaan suku cadang dan bahan bakar/pelumas kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.335.965,- terealisasi sebesar Rp3.335.965,- atau 100%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan mebel kantor.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.999.440,- terealisasi sebesar Rp1.647.600,- atau 18.31%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan mesin potong rumput.
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.993.100,- terealisasi sebesar Rp49.500,- atau 0,50%. Anggaran ini dimaksudkan untuk membiayai pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor.
- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.991.080,- terealisasi sebesar Rp49.988.440,- atau 99,99%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor, penggantian kusen dan kaca jendela 6 unit ruang kerja, pemeliharaan 1 unit selasar gedung kantor,
- f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.000.000,- terealisasi sebesar Rp8.050.000,- atau 67,08%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan jasa pemeliharaan AC

dan jasa pemeliharaan laptop serta printer untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

II. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Sekretariat Bapperida Kab. Sikka

Sekretariat Bapperida dalam menjalankan tugasnya di dukung oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pelaksanaan tugas selama tahun 2024 diantaranya adalah :

- ✓ Rekonsiliasi Data Peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Kepesertaan JKN-KIS
- ✓ Implementasi e-persuratan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi perkantoran melalui aplikasi e-persuratan
- ✓ Bimbingan Teknis (zoom met) Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
- ✓ Fasilitasi usulan Kenaikan Gaji Berkala ASN
- ✓ Fasilitasi usulan kenaikan pangkat ASN
- ✓ Fasilitasi permohonan cuti pegawai
- ✓ Fasilitasi Mahasiswa UNIPA Maumere untuk melakukan Magang dan Penelitian di Kantor Bapperida Kab. Sikka
- ✓ Melakukan penyusunan dan penyesuaian kembali nominatif pegawai Bapperida Tahun 2024
- ✓ Penyusunan Analisis Beban Kerja Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (Penyetaraan) dan Jabatan Fungsional Umum
- ✓ Pendampingan tata cara penginputan kinerja pegawai dan melakukan verifikasi absensi pegawai (Perjalanan dinas, sakit dan cuti) melalui aplikasi Santer
- ✓ Pendampingan penyusunan SKP ASN Bapperida Tahun 2024
- ✓ Koordinasi dan konsultasi tentang urusan kepegawaian Bapperida Kab. Sikka.

2. Perencana Ahli Muda (Koordinator urusan Program Evaluasi dan Pelaporan)

Pelaksanaan tugas selama tahun 2024 diantaranya adalah :

- ✓ Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bapperida berupa dokumen IKU, Renja Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2024
- ✓ Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah berupa dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Realisasi Belanja Langsung.
- ✓ Koordinasi dan Penginputan Program/Kegiatan dalam aplikasi SIRUP dan SIPD
- ✓ Penyusunan dokumen SAKIP Bapperida Kab. Sikka baik dokumen induk dan Perubahan Tahun 2024
- ✓ Koordinasi dan Fasilitasi dengan bidang-bidang dalam rangka Penyusunan dan penginputan RKA dan RAK Bapperida Tahun 2024 dan Tahun 2025
- ✓ Penyusunan laporan evaluasi Renja Triwulan I-IV Tahun 2024
- ✓ Pendampingan mahasiswa magang UNIPA

- ✓ Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bapperida Tahun 2024
 - ✓ Penyusunan Laporan Realisasi Barang dan Jasa Januari-Desember 2024
 - ✓ Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Januari-Desember 2024
 - ✓ Penyusunan Laporan Monitoring Internal Bapperida Tw I – Tw IV Tahun 2024
 - ✓ Pelaksanaan tugas lainnya
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Koordinator urusan Keuangan dan Aset)
- Pelaksanaan tugas selama tahun 2024 diantaranya adalah :
- ✓ Melakukan verifikasi dokumen pengajuan UP, GU dan TU serta LS untuk pelaksanaan kegiatan Bapperida selama Tahun 2024
 - ✓ Melakukan verifikasi dan validasi terkait permohonan belanja operasional kegiatan kantor dari bidang-bidang
 - ✓ Melakukan verifikasi berkas /bahan laporan barang persediaan, pemeliharaan dan inventaris aset tetap (Bulan Desember, Semester II dan Tahunan) Tahun 2024
 - ✓ Melakukan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2023 dan draft laporan Tahun 2024 (Laporan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024)
 - ✓ Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2023 dan 2024 : Menyusun Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2024
 - ✓ Mengkoordinasikan persiapan pemberkasan, verifikasi dan pengajuan UP (Bukti setoran UYHD, Setoran TU, Pengesahan Laporan Aset Desember, Pengesahan SPJ GU Nihil Desember 2024, Pengesahan SPJ Penerimaan Desember 2024, Rencana Kerja Tahunan Bidang/Sekretariat)
 - ✓ Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan kebutuhan pemeriksaan BPKP
 - ✓ Mengkoordinasikan urusan pergantian STNK dan Plat Nomor Kendaraan
 - ✓ Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan finalisasi Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024
 - ✓ Mendampingi proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi SIPD dan manual
 - ✓ Proses Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Bapperida Tahun 2024 : Pengumpulan bahan, Penginputan dan Verifikasi berkas /bahan laporan, Pengiriman ke Bidang Aset
 - ✓ Koordinasi, fasilitasi dan tindaklanjut atas hasil temuan inspektorat
 - ✓ Melakukan kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan transaksi melalui CMS

B. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (PPEPD)

I. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Capaian Tahun 2024.

Tahun 2024 melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan di dukung oleh 4 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.279.669.130,- terealisasi sebesar Rp2.030.025.640,- atau 89.05%, untuk membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.152.195.490,- terealisasi sebesar Rp1.088.237.400,- atau 94,45%. Melalui Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratik 2025-2029, Dokumen RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 serta Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045; kegiatan ini meliputi 4 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.149.080,- terealisasi sebesar Rp39.931.600,- atau 99,46% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 Berita Acara pelaksanaan koordinasi Forum Perangkat Daerah.
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp187.212.540,- realisasi sebesar Rp182.093.100,- atau 97,27% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
 - c) Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp95.426.070,- realisasi sebesar Rp94.672.500,- atau 99,21% dengan output yang dihasilkan yaitu Data Perencanaan Terinput dalam Aplikasi SIPD sebanyak 582 usulan.
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp829.407.800,- realisasi sebesar Rp771.540.200,- atau 93.02% dengan output yang dihasilkan yaitu Dokumen RPJMD Teknokratik 2025-2029, Dokumen RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 serta Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar R99.002.760,- terealisasi sebesar Rp79.422.220,- atau 80,22% yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :
 - a) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp17.452.080,- realisasi sebesar Rp15.741.320,-

- atau 90,20% dengan output yang dihasilkan yaitu Dokumen Sebaran Program dan Kegiatan;
- b) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.81.550.680,- realisasi sebesar Rp.63.680.900,- atau 78,09% dengan output yang dihasilkan yaitu Buku Profil Daerah Kabupaten Sikka.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp702.290.880,- terealisasi sebesar Rp560.295.220,- atau 79,78% yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :
 - a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.230.963.680,- realisasi sebesar Rp.146.366.920,- atau 63,37% dengan output yang dihasilkan yaitu Usulan DAK yang terinput dalam aplikasi KRISNA dan koordinasi TP-Dekon.
 - b) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.471.327.200,- realisasi sebesar Rp.413.928.300,- atau 87,82% dengan output yang dihasilkan yaitu Dokumen Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023 dan Dokumen Evaluasi RKPD Triwulan I-III Tahun 2024, Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023.
 4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp326.180.000,- terealisasi sebesar Rp302.070.800,- atau 92,61% kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.326.180.000,- realisasi sebesar Rp.302.070.800,- atau 92,61% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi pelaksanaan SIPD Terintegrasi.

II. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029
 - Persiapan penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029
 - Pembentukan Tim penyusun Dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029
 - Pengumpulan data Dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029
 - Rapat Pembahasan dan Penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.
 - Finalisasi Dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

- Penggandaan Dokumen Dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029
2. Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025.
- Persiapan Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Pengumpulan Data dan Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Rapat Tim Penyusunan Rancangan Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Penyusunan Rancangan Awal Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Pembahasan dan Penentuan Indikator Program Prioritas Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025.
 - Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 oleh APIP Kabupaten Sikka
 - Finalisasi Pagu Anggaran untuk RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Finalisasi Penginputan Usulan Pokir DPRD Kabupaten Sikka pada SIPD-RI
 - Pendampingan Teknis Verifikasi dan Validasi Usulan Pokir DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Pelaksanaan Asistensi dan Desk Renja - RKA Perangkat Daerah
 - Pendampingan Penginputan Renja Perangkat Daerah pada SIPD-RI
 - Review Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 oleh APIP Kabupaten Sikka
 - Ekspose hasil Review APIP atas Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025.
 - Penyusunan Ranperbup tentang Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Pembahasan Rancangan Perbup tentang Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Fasilitasi Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 oleh Bappelitbangda Provinsi NTT
 - Penetapan Peraturan Bupati tentang Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025.
3. Penyusunan Dokumen Profil Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- Persiapan Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Pengumpulan Data Profil Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Rapat Tim Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Penyusunan Rancangan Profil Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Pembahasan Rancangan Profil Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

- Finalisasi Profil Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Penggandaan dokumen Profil Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
4. Musrenbang desa, Kecamatan dan Kabupaten
- Sosialisasi Penerapan SIPD-RI untuk Perencanaan Tahun 2025
 - Penginputan Usulan Hasil Musrenbang Tingkat Desa pada SIPD-RI.
 - Penginputan Permasalahan dan Indikator Per Program untuk RPD pada SIPD-RI
 - Persiapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka Tingkat Kecamatan.
 - Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi dan Survey Hasil Usulan Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Pendampingan Penginputan Usulan Pokir DPRD Kabupaten Sikka pada SIPD-RI.
 - Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Desk Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025.
- Persiapan surat undangan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025
 - Berita acara pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 beserta lampirannya.
6. Penyusunan Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023.
- Persiapan Tim Penyusunan Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023
 - Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023
 - Pengumpulan dan Pengambilan Data untuk Penyusunan Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023.
 - Penyusunan Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023
 - Rapat verifikasi dan validasi data LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023
 - Sinkronisasi Data dan Finalisasi Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023
 - Penyampaian LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023 kepada DPRD Kabupaten Sikka.
 - Penyusunan Jawaban Pemerintah atas Sorotan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sikka atas LKPJ Bupati Sikka

7. Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2023 dan 2024

Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023

- Persiapan surat pengiriman pelaksanaan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023
- Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pengiriman data evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023
- Merekap Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023 yang dikirim oleh perangkat daerah.
- Rapat Evaluasi bersama perangkat daerah terhadap Rancangan Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023
- Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023
- Penggandaan Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 5 dokumen dan dikirim ke Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024

- Persiapan surat pengiriman pelaksanaan Evaluasi Triwulan I Tahun 2024
- Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pengiriman data evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024
- Merekap Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024 yang dikirim oleh perangkat daerah.
- Rapat Evaluasi bersama perangkat daerah terhadap Rancangan Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024
- Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024
- Penggandaan Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 5 dokumen dan dikirim ke Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Laporan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024

- Persiapan surat pengiriman pelaksanaan Evaluasi Triwulan II Tahun 2024
- Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pengiriman data evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024
- Merekap Laporan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024 yang dikirim oleh perangkat daerah.
- Rapat Evaluasi bersama perangkat daerah terhadap Rancangan Laporan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024
- Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024
- Penggandaan Laporan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 5 dokumen dan dikirim ke Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Laporan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2024

- Persiapan surat pengiriman pelaksanaan Evaluasi Triwulan III Tahun 2024

- Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pengiriman data evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2024
 - Merekap Laporan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2024 yang dikirim oleh perangkat daerah.
 - Rapat Evaluasi bersama perangkat daerah terhadap Rancangan Laporan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2024
 - Dokumen Laporan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2024
Penggandaan Laporan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 5 dokumen dan dikirim ke Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024
- Persiapan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Pengumpulan Data dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Rapat Tim Penyusunan Rancangan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Penyusunan Rancangan Awal Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024
 - Pembahasan dan Penentuan Indikator Program Prioritas Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024.
 - Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 oleh APIP Kabupaten Sikka
 - Finalisasi Pagu Anggaran untuk Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024

Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bidang PPEPD adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya support data pendukung dari Perangkat Daerah yang bersamaan dengan perangkat daerah lain sesuai target waktu pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan
2. Kurangnya konsistensi data perencanaan dari masing-masing komponen data (data selalu berubah)
3. Waktu Pelaksanaan penyusunan dokumen bersamaan antara penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratik 2025 – 2029 dan Ranwal RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 sehingga keterlambatan pembahasan dan fasilitasi di Bapperida da Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Dalam pemanfaatan Aplikasi perencanaan dari SIPD RI sering terkendala di jaringan yang tidak stabil sehingga menyebabkan proses penginputan menjadi lambat
5. Pengiriman laporan Evaluasi RKPD dari perangkat daerah yang belum sesuai format.

b) Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bidang PPEPD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara bidang dalam lingkup kerja Bapperida untuk menghasilkan beberapa dokumen perencanaan Kabupaten antara lain Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024.
2. Peningkatan Kerja sama dengan instansi lain untuk pelaksanaan perencanaan yang lebih baik.
3. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD atas dokumen perencanaan (RKPD) dan Dokumen LKPJ.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan untuk mensinergis pelaksanaan tugas Bidang.

C. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (PPM)

I. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Capaian Tahun 2024.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh 3 Bidang. Tahun 2024 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melalui program ini melaksanakan 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp614.639.970,- terealisasi sebesar Rp454.486.236,- atau 73,94%. Kegiatan ini meliputi 7 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp91.432.180,- terealisasi sebesar Rp75.599.756,- atau 87,06% dengan output yang dihasilkan yaitu Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang koordinasi, verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kunjungan Kerja Dalam Rangka Penjajakan Kerja Sama Antar Daerah di Sektor Kesehatan, Infrastruktur, Pertanian, Peternakan, Pariwisata, Perikanan dan Pendapatan Daerah, tersusunnya Dokumen TKPKD Tahun 2024, tersusunnya Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2024.
 - b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.905.800,- realisasi sebesar Rp.12.411.400,- atau 65,65% dengan output yang dihasilkan yaitu Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang koordinasi dan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.106.370,- realisasi sebesar Rp.13.718.400,- atau 71,80% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi perangkat daerah bidang koordinasi dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah.
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan pagu anggaran Rp.34.426.200,- realisasi sebesar Rp.590.100,- atau 1,71%.
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp395.869.930,- terealisasi sebesar Rp330.380.980,- atau 83,46% dengan output yang dihasilkan yaitu Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang koordinasi, Assesment PAUD HI di 34 PAUD.

- f) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.352.890,- realisasi sebesar Rp.11.774.800,- atau 34,28% dengan output yang dihasilkan yaitu Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang koordinasi.
- g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan pagu anggaran sebesar Rp.20.546.600,- realisasi sebesar Rp.6.010.800,- atau 29,25% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi perangkat daerah bidang koordinasi dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulan Perangkat daerah.

II. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kegiatan penyusunan kalender kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tahun 2024.
- Kegiatan penyusunan RKT Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tahun 2024.
- Kegiatan penyusunan RAK Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tahun 2024.
- Kegiatan Penyusunan SK Tim Koordinasi Bidang PPM dan SK AKI,AKB,Stunting Tahun 2024
- Kegiatan menginventarisir Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan
- Kegiatan koordinasi pemerintahan melalui Verifikasi dan validasi data PBI di tingkat desa/kelurahan.
- Kegiatan Pengisian Matriks dan Laporan Triwulan IV Penanggulangan Kemiskinan
- Kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
- Kegiatan evaluasi RPJMD Tahun 2024
- Kegiatan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2025
- Kegiatan penyusunan LKPJ tahun 2024.
- Kegiatan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023
- Kegiatan Pelaksanaan Operasi Timbang Bulan Februari Tahun 2024
- Kegiatan Penginputan Aksi 7 & 8 Stunting
- Koordinasi teknis dengan perangkat daerah bikor pemerintahan dan pembangunan manusia perihal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia

- Kegiatan Monitoring pengisian Renja 2025 Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengisian Aksi 1 dan 2 stunting
- Kegiatan Monitoring pelaksanaan Verval data P3KE
- Kegiatan Survei RKPD Tahun 2024
- Kegiatan pengisian aksi 2 dan aksi 3 stunting pada aplikasi Bina Bangda
- Kegiatan Koordinasi teknis Terkait Stunting dengan perangkat daerah bikor pemerintahan dan pembangunan manusia perihal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia
- Kegiatan Penyusunan Dokumen TKPKD Tahun 2024
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2024
- Kegiatan pelaksanaan penilaian kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi stunting tahun 2024
- Kegiatan Persiapan Penetapan PAUD HI
- Kegiatan penyusunan RPJMD Teknokratik Tahun 2024
- Kegiatan Asistensi RKA Perangkat Daerah Koordinasi Tahun 2024
- Kegiatan Assesment PAUD HI untuk 34 PAUD
- Kegiatan Monitoring Penerapan ILP
- Kegiatan Monitoring Penerapan BLUD
- Kegiatan Konsultasi Ranperbup BLUD dan Kemiskinan
- Kegiatan Koordinasi teknis Terkait Stunting dengan NGO dan perangkat daerah bikor pemerintahan dan pembangunan manusia perihal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia

Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang PPM adalah sebagai berikut :

1. Terkait pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data P3KE desa belum membuat data balikan terhadap hasil verifikasi dan validasi
2. Pelaksanaan penginputan aksi 7 & 8 stunting pada web bina bangda masih terdapat beberapa Perangkat Daerah Konvergensi yang belum menginput dengan tepat waktu.

b) Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang PPM adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi penyelesaian kegiatan di lapangan.
2. Koordinasi penyelesaian kegiatan di bidang.
3. Koordinasi penyelesaian laporan evaluasi
4. Koordinasi penyelesaian kegiatan di bidang dengan perangkat daerah terkait
5. Koordinasi penyusunan mekanisme kerja

D. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (IW)

I. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Capaian Tahun 2024.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh 3 Bidang. Tahun 2024 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melalui program ini melaksanakan 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp352.801.620,- terealisasi sebesar Rp280.623.960,- atau 79,54%. Kegiatan ini meliputi 8 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.414.730,- terealisasi sebesar Rp73.343.400,- atau 84,87% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2045, koordinasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, dan koordinasi penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Infrastruktur Tahun 2025 5 Dokumen.
 - b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.518.160,- realisasi sebesar Rp.11.857.980,- atau 43,09% dengan output yang dihasilkan yaitu 5 dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diasistensi.
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan pagu anggaran sebesar Rp.46.397.820,- realisasi sebesar Rp.44.298.400,- atau 95,48% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi perangkat daerah bidang koordinasi dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah sebanyak 25 dokumen.
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan pagu anggaran sebesar Rp35.916.560,- realisasi sebesar Rp.31.553.900,- atau 87,85% dengan output yang dihasilkan yaitu 5 dokumen laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.446.390,- terealisasi sebesar Rp24.731.800,- atau 56,92% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi penyusunan

dokumen Renja Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Kewilayahan Tahun 2025 21 Dokumen.

- f) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.532.060,- realisasi sebesar Rp.16.593.700,- atau 84,96% dengan output yang dihasilkan yaitu 21 dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diasistensi.
- g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.44.896.300,- realisasi sebesar Rp.34.780.900,- atau 77,47% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi perangkat daerah bidang koordinasi dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulan Perangkat daerah sebanyak 21 dokumen.
- h) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan pagu anggaran Rp.48.679.600,- realisasi sebesar Rp.43.463.880,- atau 89,29% dengan output yang dihasilkan yaitu 21 dokumen laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

II. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Tahun 2024 melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan RPJPD Kab. Sikka Tahun 2025-2045.
- Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Perubahan RKPD Kab. Sikka Tahun 2024.
- Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2025.
- Penyusunan Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023.
- Penyusunan Dokumen Profil Daerah
- Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2025.
- Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I, II dan Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
- Penyusunan, Pembahasan dan Sosialisasi RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.
- Pelaksanaan Persiapan Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka.
- Penjajakan Kerjasama Antar Daerah.
- Pengukuhan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka.
- Pemenuhan kelengkapan dokumen pengusulan dan survei lokasi penanganan dan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kota Uneng.

- Penetapan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2025.
- Penyusunan dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pj. Bupati Sikka.
- Identifikasi Usulan Pembangunan Infrastruktur di Desa/Kelurahan.
- Pelaksanaan Desk Percepatan Data P3KE Hasil Verval.
- Koordinasi Teknis dengan Perangkat Daerah Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan, rapat-rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan di Bapperida Kab. Sikka

E. BIDANG RISET DAN INOVASI (RIDA)

I. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Capaian Tahun 2024.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dilaksanakan dengan di dukung oleh 4 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp935.916.100,- terealisasi sebesar Rp904.988.929,- atau 96.70%. Kegiatan ini meliputi 4 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp473.695.800,- terealisasi sebesar Rp469.736.414,- atau 99,16% dengan output yang dihasilkan 3 Dokumen yaitu Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Sikka, Penyusunan kajian strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka, Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sikka.
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.899.300,- realisasi sebesar Rp.126.612.060,- atau 98,99% dengan output yang dihasilkan 1 Dokumen yaitu Laporan hasil Penyusunan dan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.
 - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.143.500,- realisasi sebesar Rp.170.094.336,- atau 91,87% dengan output yang dihasilkan 1 Laporan yaitu Laporan capaian indikator kinerja.
 - d) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan dengan pagu anggaran Rp.149.177.500,- realisasi sebesar Rp.138.546.119,- atau 92.87% dengan output yang dihasilkan 1 Laporan yaitu Laporan koordinasi dan pengambilan data penelitian dan perencanaan pembangunan.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp682.316.100,- terealisasi sebesar Rp667.641.960,- atau 97.85%. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp682.316.100,- terealisasi sebesar Rp667.641.960,- atau 97,85% dengan output yang dihasilkan 2 Dokumen yaitu Dokumen rencana induk pariwisata dan Dokumen rencana induk Geopark.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp826.914.600,- terealisasi sebesar Rp800.793.633,- atau 96.84%. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp826.914.600,- terealisasi sebesar Rp800.793.633,- atau 96.84% dengan output yang dihasilkan 3 Dokumen yaitu Dokumen EHRA, DED Drainase Perkotaan dan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL).
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.332.226.968,- terealisasi sebesar Rp1.284.609.120,- atau 96.43%. Kegiatan ini meliputi 4 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.144.999.268,- realisasi sebesar Rp.1.120.959.170,- atau 97,90% dengan output yang dihasilkan 4 laporan yaitu Laporan Uji coba Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pakan ternak, Laporan Pendampingan dan pelatihan pengemasan minuman alkohol tradisional, Laporan Pelatihan pengolahan kebun petani hortikultura, Pengembangan aplikasi reporting UKPBJ.
 - b) Sub Kegiatan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dana penerapan teknologi dengan pagu anggaran sebesar Rp.149.999.900,- realisasi sebesar Rp.147.271.690,- atau 98,18% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 Laporan Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.
 - c) Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.228.000,- realisasi sebesar Rp.4.144.800,- atau 98,03% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 laporan Identifikasi Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2024, Innovation Government Awards (IGA) Tahun 2024 Oleh Kementerian Dalam Negeri dan Sosialisasi Replikasi Inovasi.
 - d) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan pagu anggaran sebesar Rp.32.999.800,- realisasi sebesar Rp.12.233.460,- atau 37,07% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 laporan Koordinasi Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis.

II. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Riset dan Inovasi.

Bidang Riset dan Inovasi pada Tahun 2024 melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE

Dari hasil kajian Rekomendasi yang dihadirkan sebagai langkah dalam pengembangan SPBE meliputi pemetaan proses bisnis SPBE, inovasi produk digital, pengembangan aplikasi dan layanan digital yang lebih canggih dan ramah pengguna, penyusunan detail data yang terintegrasi dalam Satu Data sehingga

menampilkan standar data yang jelas, penambahan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan Satu Data Kabupaten Sikka, ekspansi dan pemerataan jaringan internet, arsitektur pada pusat data yang harus modular dan *scalable*, penerapan framework keamanan, penyusunan detil-detil penerapan manajemen SPBE, pelatihan untuk menambah ketersediaan sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas pemahaman dan keahlian terkait pelaksanaan SPBE, penyusunan roadmap pengembangan SPBE, sinkronisasi penggunaan aplikasi daerah dengan aplikasi pemerintah pusat, dan pembentukan tim auditor bekerja sama dengan layanan dari BRIN.

2. Penyusunan kajian strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka

Dari hasil kajian maka Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka sebagai berikut:

1) Memperluas dan memperdalam inovasi :

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai dengan wajib pajak/retribusi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

2) Memperluas basis penerimaan.

Perluasan basis penerimaan dapat dipungut oleh daerah jika dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengidentifikasi pembayar retribusi baru, memperbaiki basis data objek retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Memperluas basis penerimaan tergolong pada kebijakan ekstensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam penggalan potensi retribusi daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Sikka hendaknya mengembangkan sistem yang terintegrasi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahap awal pemerintah daerah minimal harus membangun basis data perpajakan dan retribusi daerah, agar data- data perpajakan dan retribusi daerah yang tadinya diolah secara manual dapat diolah dengan lebih cepat berdasarkan sistem informasi tertentu. Dalam pengembangan sitem informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Basis data dapat mempercepat upaya pelayanan kepada masyarakat, menghasilkan

informasi dengan cepat dan tepat sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kemampuan basis data dapat dioptimalkan. Misalkan, dalam analisis pendapatan asli daerah, analisis kinerja keuangan daerah, dan analisis keuangan lainnya. Dengan tersedianya Basis Data maka sangat memudahkan pengambilan keputusan terkait basis data yang dikembangkan.

- 3) Memperkuat proses pemungutan
Dilakukan dengan mempercepat implementasi Perda khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. Sanksi yang kurang tegas dari pemerintah daerah mengakibatkan banyak wajib retribusi yang tidak melaksanakan menunggak kewajiban pembayaran retribusinya.
 - 4) Meningkatkan pengawasan
Dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi dan sanksi terhadap pihak aparatur yang berbuat salah, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Kebocoran penerimaan daerah dari retribusi daerah terjadi karena adanya oknum petugas pemungut yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik.
 - 5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Dilakukan dengan cara memperbaiki dan menyederhanakan prosedur administrasi pajak guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.
 - 6) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
3. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sikka
Proses Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sikka Tahun 2016-2030 menghasilkan draft naskah akademik tentang perubahan dokumen Ripparda Tahun 2016-2030 serta juga menghasilkan draft rancangan peraturan daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2030 yang akan dilakukan harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Nusa

Tenggara Timur dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka.

4. Penyusunan dan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Sikka Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran pada 6 Dimensi yaitu :

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, nilai yang diperoleh sebesar 11,994 dari total nilai 15.
2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD, nilai yang diperoleh sebesar 19,6552 dari total nilai 20.
3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, nilai yang diperoleh sebesar 14,2241 dari total nilai 15.
4. Dimensi Penyerapan Anggaran, nilai yang diperoleh sebesar 10 dari total nilai 20.
5. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah, nilai yang diperoleh 2,1465 dari total nilai 15.
6. Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD, nilai yang diperoleh sebesar 15 dari total nilai 15.

Dari uraian di atas dapat diperoleh Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Sikka Tahun 2023, Tahun Pengukuran 2024 didapat dengan menjumlahkan seluruh Indeks pada setiap Dimensi $11,994 + 19,655 + 14,224 + 15 + 2,147 + 15 = 78,02$, dengan Peringkat Perlu Perbaikan dan Nilai B.

5. Penyusunan capaian indikator kinerja

Dari 30 (tiga puluh) indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk mengukurnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID), serta 1 (satu) Indikator kinerja daerah yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah yakni Bapelitbang yaitu Indikator Indeks Kualitas Perencanaan.

a) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan pada Tahun 2022 dengan nilai rata-rata IKM di Kabupaten Sikka sebesar 2,79 dalam

kategori "puas". Nilai pengukuran IKM ini jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Sikka untuk Tahun 2022 yaitu sebesar 2,6 maka realisasi IKM telah melampau target.

Pada Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, survey dilakukan terhadap 2 (dua) instansi yang melakukan pelayanan publik yakni RSUD T.C. Hillers Maumere dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari ke-2 instansi tersebut diperoleh hasil :

1) RSUD T.C. Hillers Maumere

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar : **77,41** maka kinerja unit pelayanan berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori **BAIK**

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar : **89,16** maka kinerja unit pelayanan berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori **SANGAT BAIK**,

b) Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)

Infrastruktur adalah struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau pelayanan publik. Infrastruktur juga disebut prasarana dan dapat mencakup berbagai macam hal yang bersangkutan dengan pengangkutan, konstruksi, pasokan listrik, dan lain-lain.

Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar di Kabupaten Sikka yang di ukur pada Tahun 2023 sebesar 56,40 dengan kondisi "Rusak Sedang".

Pada Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar, dari hasil kajian menunjukkan bahwa IKID Kabupaten Sikka untuk :

- 1) Saluran Irigasi sebesar 49,77% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Sedang**.
- 2) Akses Air Minum sebesar 19,786% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Berat**.
- 3) Akses Air Limbah/Sanitasi Layak sebesar 61,92% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Sedang**.
- 4) Kondisi Drainase (3 Kelurahan Kota) sebesar 31,33% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Berat**.
- 5) Jalan sebesar 60% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Sedang**.

- 6) Jembatan sebesar 89,25% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Ringan**.
 - 7) Rumah Layak Huni sebesar 71,875% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Sedang**.
 - 8) Penerangan Jalan sebesar 38,02% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Berat**.
 - 9) Lampu Lalu Lintas sebesar 36,67% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Berat**.
 - 10) Terminal (Lokaria dan Madawat) sebesar 55,56% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Sedang**.
 - 11) Pelabuhan (Lorens Say) sebesar 75% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Rusak Sedang**.
 - 12) Bandara (Frans Seda) sebesar 92,31% dengan kategori sesuai Permen PU Nomor 12/PRT/M/2015 adalah **Baik**.
- c) Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)
- d) Indeks Kualitas Perencanaan adalah ukuran kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran indeks perencanaan pembangunan dilakukan dengan dimensi teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan atas bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hasil dari penilaian IKP dapat menggambarkan kondisi perencanaan di Pemerintahan Daerah. Penilaian IKP dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kabupaten Sikka sebesar **92,42** atau berada pada kategori **SANGAT BAIK**.
6. Kegiatan koordinasi dan pengambilan data penelitian dan perencanaan pembangunan
 7. Penyusunan rencana induk pariwisata
 8. Penyusunan rencana induk Geopark
 9. Penyusunan Dokumen EHRA
Indeks Risiko Sanitasi Kabupaten Sikka dihitung berdasarkan rata rata IRS Kelurahan yang di nilai dan diperoleh nilai 256,05 dengan kategori Risiko sangat Tinggi. Hasil EHRA menunjukan Kabupaten Sikka memiliki masalah sanitasi pada air limbah domestik dengan IRS kategori Risiko Sangat Tinggi.
 10. Penyusunan Dokumen DED Drainase Perkotaan

11. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL).
12. Uji coba Pelatihan pembuatan pakan ternak
Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta terdiri dari 20 orang peserta dari Desa Bola dan Desa Wolokoli berlokasi di Desa Wolokoli Kecamatan Bola, 20 orang peserta dari Desa Egon dan Desa Wairkelang bertempat di Aula Camat Waigete serta 20 orang peserta dari Desa Hepang bertempat di Desa Hepang, Kecamatan Nita
13. Pendampingan dan pelatihan pengemasan minuman alkohol tradisional
Kegiatan uji coba dan pelatihan kewirausahaan pengemasan minuman beralkohol berlangsung di Desa Gong Bekor, dengan menghadirkan peserta sebanyak 40 orang dengan rincian 20 orang dari Desa Gong Bekor dan 20 orang dari Desa Watugong Kecamatan Alok Timur.
14. Pengembangan aplikasi reporting UKPBJ
15. Pelatihan pengolahan kebun petani hortikultura
Pelatihan pengolahan kebun petani hortikultura dilaksanakan tanggal 30 Desember 2024 diikuti oleh Peserta dari Kelompok Sinar Tani, Kelompok Tani Abadi, Kelompok Usaha Tani Wairpuan-Desa Ladogahar dan Kelompok Teguh Mandiri-Desa Tebuk, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.
16. Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024
Berdasarkan hasil penilaian, ditetapkan pemenang Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagai berikut:
 - **Terbaik III: Inovasi GEMASEJIWAKU** (Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku) oleh Puskesmas Tanarawa dengan total nilai **85,66**
 - **Terbaik II : Inovasi Membangun 'Gurita' Pondok Baca Kampung Kabor** oleh Yohanes Kia Nunang, S.I.K/Pondok Baca Kampung Kabor dengan total nilai **87,58**
 - **Terbaik I :Inovasi Jalan Mantan (Jalan Layani Masyarakat Rentan)** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dengan total nilai **88,33**
17. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Inovasi Gema sejiwaku berhasil mendapatkan penghargaan TOP 10 INOVASI TERBAIK KOIN-YANLIK (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Provinsi NTT Tahun 2024.
18. Kegiatan Identifikasi Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2024

19. Kegiatan Innovation Government Awards (IGA) Tahun 2024 Oleh Kementerian Dalam Negeri
20. Kegiatan Koordinasi Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (HAKI)
Untuk hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah teridentifikasinya produk potensial yang akan diajukan untuk mendapatkan identifikasi geografis adalah Advokad Leden Puan.

Rekomendasi :

1. Diperlukan Kebijakan/peraturan untuk mendorong penguatan inovasi di Perangkat Daerah;
2. Agar pengambilan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengacu hasil kajian/riset;
3. Agar dilakukan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

F. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (PSDA)

I. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Capaian Tahun 2024.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh 3 Bidang. Tahun 2024 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melalui program ini melaksanakan 1 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp380.536.090,- terealisasi sebesar Rp287.997.087,- atau 75,68%. Kegiatan ini meliputi 8 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.845.580,- terealisasi sebesar Rp38.894.000,- atau 92,95% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Infrastruktur Tahun 2025 19 Dokumen.
 - b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.679.860,- realisasi sebesar Rp.43.842.157,- atau 47,82% dengan output yang dihasilkan yaitu 14 dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diasistensi.
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan pagu anggaran sebesar Rp.58.842.240,- realisasi sebesar Rp.57.689.400,- atau 95,48% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi perangkat daerah bidang koordinasi dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah sebanyak 29 dokumen.
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan pagu anggaran sebesar Rp31.994.730,- realisasi sebesar Rp.25.201.470,- atau 78,77% dengan output yang dihasilkan yaitu 14 dokumen laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian.
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.323.460,- terealisasi sebesar Rp32.433.760,- atau 80,43% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Koordinasi Bidang SDA Tahun 2025 8 Dokumen.

- f) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.641.710,- realisasi sebesar Rp.21.120.200,- atau 76,41% dengan output yang dihasilkan yaitu 4 dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diasistensi.
- g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan pagu anggaran sebesar Rp.57.812.690,- realisasi sebesar Rp.40.117.800,- atau 69,39% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi perangkat daerah bidang koordinasi dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah sebanyak 9 dokumen.
- h) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dengan pagu anggaran Rp.30.395.820,- realisasi sebesar Rp.28.698.300,- atau 94,42% dengan output yang dihasilkan yaitu 4 dokumen laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA.

II. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2024 melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

G. UPT. SIKKA INOVATION CENTER (SIC)

I. Gambaran Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Capaian Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan UPT. SIC di Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Target kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan UPTD Pengolahan Produk Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dengan Jumlah Alokasi Anggaran Sebesar Rp1.144.999.268,- di dukung melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan 1 sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan realisasi sebesar Rp1.120.959.170,- atau sebesar 97.90% dengan output yang dihasilkan yaitu Produksi dan Promosi Produk Chosik, Pengembangan Aplikasi Reporting UKPBJ, Pelatihan Pengolahan Cokelat, Pelatihan Pengemasan Minuman Alkohol Tradisional, Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik dan Pakan Ternak.

II. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 UPTD. SIC.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengolahan Produk Daerah pada tahun 2024 hanya mempunyai 1 (satu) Program Kegiatan yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah yang meliputi 1 (satu) sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Kalender Kerja Tahunan 2024 dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengontrol Pekerjaan pembuatan cokelat bubuk dan cokelat batang;
2. Mengikuti kegiatan Pameran dan Bazar UMKM, CFN dan Event event besar yang diselenggarakan oleh Pihak Pemerintah maupun pihak Swasta;
3. Mengikuti Kegiatan Karnaval sekaligus memperkenalkan Produk Pengolahan UPTD kepada masyarakat umum Kabupaten Sikka;
4. Memberikan data dan informasi kepada para pelajar dari tingkat TK, SMK dan Mahasiswa juga kepada masyarakat umum lainnya tentang pengolahan Produk Cokelat;
5. Membuat inovasi varian baru berupa cokelat rasa Kayumanis atau cinamoon.
6. Melakukan Survey dan Koordinasi ketersediaan bahan baku kakao fermentasi pada kelompok Tani, kelompok KSU dan pengepul;
7. Mendesain Kemasan –kemasan baru masing-masing varian cokelat.
8. Melakukan Penjualan Produk Cokelat di Galery Mini Chosik.

Data perolehan dapat dilihat tabel Penjualan dibawah Ini :

Tabel.2.2 Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPTD. Pengolahan Produk Daerah Tahun Anggaran 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN)	REALISASI KINERJA	SERAPAN KEUANGAN	%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi terdiri dari :	1. Melakukan Pembuatan bubuk Cokelat dan cokelat batang	2 kegiatan	2 kegiatan	100
	2. Melakukan Promosi Produk (melalui Pameran UMKM, CFN, Event Event Besar yang diselenggarakan Oleh Pemda Maupun Pihak Swasta	15 Varian produk Cokelat	15 Varian Produk Cokelat	100
	3. Memberikan data dan Informasi kepada pelajar, masyarakat dan kelompok UMKM	TK, SD, SMP, SMA, Mahasiswa, dan Masyarakat dan Kelompok UMKM	6 Kegiatan	100

Tabel. 2.3
REKAPAN PENJUALAN COKLAT SIKKA BERDASARKAN VARIAN
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2024

No	Nama Produk	Bulan												Total	Harga Satuan	Jumlah Harga
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	Sep	Okt	Nop	Des			
1	Bar Besar 85 gr Milk	57	41	129	74	61	112	35	42	46	47	124	68	836	25.000	20.900.000
2	Bar Besar 85 gr Dark	43	11	63	9	52	73	24	55	18	44	27	15	434	30.000	13.020.000
3	Bar Besar 85 gr Kenari	-	22	5	13	43	18	15	-	17	41	26	15	215	30.000	6.450.000
4	Bar Besar 85 gr Mente	-	20	49	68	48	49	25	31	36	30	11	36	403	30.000	12.090.000
5	Bar Besar 85 gr Cinamon	-	-	10	17	11	7	-	-	6	-	5	5	61	30.000	1.830.000
6	Bar Besar 85 gr Kelor	-	-	24	18	33	26	-	27	10	20	13	27	198	35.000	6.930.000
7	Bar Besar 85 gr Kelor	-	-	-	2	-	2	2	-	1	6	1	1	15	40.000	600.000
8	Bar Kecil Milk 40 gr	106	81	246	89	152	278	100	90	122	212	116	165	1.757	12.000	21.084.000

No	Nama Produk	Bulan												Total	Harga Satuan	Jumlah Harga
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	Sep	Okt	Nop	Des			
9	Bar Kecil Dark 40 gr	106	12	113	57	98	177	101	66	12	133	14	78	967	15.000	14.505.000
10	Bar Kecil Mente 40 gr	53	24	112	131	106	169	99	21	105	104	75	90	1.089	15.000	16.335.000
11	Bar Kecil Kenari 40 gr	28	50	10	25	104	84	48	27	72	164	55	10	677	15.000	10.155.000
12	Bar Kecil Cinamon 40 gr	-	-	16	12	9	-	-	1	12	26	-	15	91	15.000	1.365.000
13	Bar Kecil Kelor 40 gr	-	-	-	52	-	52	6	53	29	77	22	93	384	20.000	7.680.000
14	Bar Kecil Kelor 40 gr	-	-	-	32	-	3	-	-	7	-	-	-	42	15.000	630.000
15	Candy Tabung (isi 30 biji)	1	3	51	57	32	29	23	30	36	29	32	17	340	80.000	27.200.000
16	Candy Tabung (isi 15 biji)	22	27	31	-	52	32	51	17	-	17	45	2	296	40.000	11.840.000
17	Bubuk Halft Smooth 250 gr	13	2	-	23	15	5	15	3	16	8	13	18	131	30.000	3.930.000
18	Bubul Smooth 200 gr	16	-	36	30	44	17	18	15	15	14	12	-	217	35.000	7.595.000
19	Bubuk Smooth 1000 gr	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	175.000	350.000
20	Bubuk Halft Smooth 1000 gr	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	140.000	140.000
21	Aroma Chosik 3in1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	15.000	120.000
22	Aroma Chosik 3in1 renteng	-	-	-	6	1	5	3	-	1	23	7	3	49	30.000	1.470.000
23	Aroma Chosik 3in1 renteng	-	-	21	26	7	-	-	3	10	-	-	-	67	25.000	1.675.000
24	Aroma Chosik 3in1 saset	-	-	2	89	5	-	-	-	-	-	-	-	96	2.500	240.000
25	Aroma Chosik 3in1 saset	-	-	2	25	6	11	8	-	-	1	6	-	59	3.000	177.000
26	Minuman Botol	-	-	16	38	-	-	-	-	4	18	7	5	88	15.000	1.320.000
27	Minuman Botol	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12.000	144.000
28	Minuman Botol	-	-	-	88	12	-	-	-	1	11	1	-	113	10.000	1.130.000
29	Cocoa Rosting	-	-	-	-	-	-	-	-	358	-	-	-	358	37.000	13.246.000
30	Minuman Gelas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	7.000
31	Minuman Gelas	-	-	10	22	22	-	-	-	-	-	-	-	54	5.000	270.000
32	Candy / ecer	-	-	-	7	7	-	-	-	-	23	-	1	38	3.000	114.000
33	Candy / ecer	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	8	2.500	20.000
	Total															204.562.000
	Potongan 5 % (Riseller)															2.234.000
	Jumlah Bersih															202.328.000

Dari Hasil Penjualan Retribusi Produk Unggulan Daerah coklat sikka selama tahun 2024 sebesar Rp. 202.328.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau 80,93 %, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada UPTD. SIC adalah sebagai berikut :

1. Kurang ketersediaan Stok bahan baku kakao kering diawal tahun, sehingga proses produksi tidak berjalan lancar;
2. Harga Bahan Baku kakao Melonjak;
3. Penyetoran PAD tidak mencapai target dari target yang ditetapkan;
4. Kurang Koordinasi dengan Dinas Teknis terkait ketersediaan bahan baku Kakao kering;
5. Kurangnya daya minat pembeli dan Promosi keluar;
6. Keterbatasan ilmu, sehingga butuh pelatihan/diklat/studi banding terkait pengembangan dan inovasi.

b) Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian dalam penyelenggaraan program dan kegiatan UPTD. SIC adalah sebagai berikut :

1. Melakukan ketersediaan bahan baku kakao dengan kelompok tani untuk mendapatkan stok kakao kering sehingga proses produksi tidak terhambat
2. Melakukan pendekatan serta mengirim surat penawaran produk kepada pemilik usaha toko/pabrik/hotel/waralaba untuk kerjasama.
3. Melakukan promosi melalui Pameran UMKM yang diselenggarakan pihak swasta maupun Pemerintah, baik dalam daerah maupun luar daerah
4. Membangun komitmen Pemkab Sikka yang mana kwitansi pembelian chosik menjadi salah satu syarat bagi pelaku perjalanan dinas (Instansi Pemkab Sikka)

Foto-foto pelaksanaan kegiatan BAPPERIDA KAB. SIKKA Tahun 2024

Gambar 2.1

A. SEKRETARIAT



B. BIDANG PPEPD

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025



C. BIDANG PPM

Rapat Evaluasi Stunting



Verifikasi Data P3KE



D. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Zoom Meeting Inpres Air Minum



Rapat Study EHRA



Asistensi Renja perangkat Daerah th 2025





Rapat Study EHRA dan Pelatihan Enumerator



Rakor Pengusulan Inpres Air Minum Tahap III



Workshop Pembinaan PKP Tahun 2024

E. BIDANG PSDA

F. BIDANG RIDA



Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE

Penyusunan Kajian Strategis PAD



Penyusunan NA Ranperda RIPARDA



Penyusunan Capaian Indikator Kinerja



Penyusunan Rencana Induk Pariwisata dan Rencana Induk Geopark





Uji coba pembuatan pakan ternak



Uji coba pengemasan minuman beralkohol



Pelatihan Petani Hortikultura



Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten



Koin Yanlik



IGA Tahun 2024

G. UPT. SIC

1. Koordinasi Ketersediaan Bahan Baku Kakao di Kelompok Tani, dan Kelompok KSU.



2. Kunjungan Masyarakat dan UMKM lainnya



3. Kunjungan Sekolah dari, TK, SMK dan Mahasiswa UNIPA Maumere



BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Laporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sikka ini memuat informasi-informasi pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapperida selama Tahun 2024.

Bapperida Kabupaten Sikka, mempunyai komitmen moral terhadap perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan demi pemenuhan pencapaian sasaran kinerja yang sudah ditetapkan.

Besar harapan laporan ini dapat memberikan informasi dan penjelasan yang memadai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan Bapperida Kabupaten Sikka dan menjadi bahan evaluasi untuk upaya perbaikan.

Maumere, 13 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka,



PAULUS HILARIUS BANGKUR, S.Pi, M. Pi

Pembina Utama Muda

NIP. 19660628 199703 1 005